

**HUBUNGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN SISTEM
SUMBERDAYA DENGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PADA DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL
GUNUNG HALIMUN SALAK**

(Studi Kasus di Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi)

Oleh:

Windra Kurniawan¹, Cecep Kusmana², Sambas Basuni² & Aris Munandar²

¹Staf UPPM STPP Bogor

²Dosen Pembimbing Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

Boundary area management is affected by four factors which are natural resources, human resources technology and institutions. The aimed of this research was to analyze the relationship between social economic dan the resource systems with community institutions on boundary area of Halimun Salak Mountain National Park. The result showed that average of respondents' age was 44 years with education level was elementary school and junior high school, income acerage was Rp 172,758.60/capita/month. The ownership of respondents house was self owner. Mostly the ownership land status of samples was renting with narrow land authorities. Income average of group members was Rp 412,500.00. The level of accessibility and management's rule locally was 76.43%. Meanwhile, the simplicity in implementing rules level was 68.98%. Gradual sanction level was 67.75%. The accountability level of the monitoring staff was 64.97%. Whereas, the level of relationship between resource system and institutions management was 63.85%. The level collective commitment to formulate rules was 82.11%. The level of adjusting toward the rules gradually to all members was 62.78%. The level of solving disagreement method was 59.22%. The level of controlling capability for the resource purpose was 60.11%. The level of relationship between resource system and institutions management was 58.50%. The level of low cost technology appropriateness was 36.05%. The time adaptation toward new technology was 1.91 months. The government fund assisting for institutions/groups was Rp 14.533.333,33. Perception on institution had positive correlation with education level and distance from their living area.

Keywords: Resource system, community institution, boundary area, Halimun Salak Mountain National Park

PENDAHULUAN

Latar belakang

Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) merupakan salah satu Taman Nasional yang ada di Indonesia, ditetapkan tanggal 26 Februari 1992 berdasarkan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 dengan luas 40.000 Ha yang sebelumnya merupakan Cagar Alam Gunung Halimun yang dilanjutkan dengan penetapan organisasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nama Balai Taman Nasional Gunung Halimun terdiri

dari tiga seksi wilayah yaitu Sukabumi, Bogor dan Lebak melalui SK No. 185/Kpts-II/1997. Pada tahun 2003, Pemerintah menetapkan penambahan luasan dan perubahan status Taman Nasional Gunung Halimun menjadi Taman Nasional Gunung Halimun Salak berdasarkan Surat Penunjukan Menteri Kehutanan No 175/Kpts-II/2003 tanggal 10 juni 2003 dengan luas kawasan 113.359 Ha, dimana Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Bogor, Sukabumi dan Lebak digabungkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Adapun penunjukan Taman Nasional tersebut merupakan suatu upaya pemerintah untuk memelihara segala potensi yang ada didalamnya dan diolah sedemikian rupa demi kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem maupun plasma nutfah yang ada didalamnya. Akan tetapi, hal itu tentunya belum tentu bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena keberadaan taman nasional tidak bisa terlepas dari kegiatan dan intervensi masyarakat yang ada di sekitarnya, yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam menunjang kehidupannya, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti yang dinyatakan oleh Gunawan (2003) yang menyatakan bahwa "Interaksi antara masyarakat dan Taman Nasional merupakan hubungan yang sangat kompleks, dan tergantung pada beberapa faktor, antara lain jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk dan kondisi sosial budaya masyarakat".

Sebagai akibat dari intervensi masyarakat pada taman nasional seperti pengambilan kayu/non kayu secara sporadis dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekologis pada kawasan taman nasional yang berujung pada kerusakan lingkungan sehingga diperlukan keberadaan daerah penyangga yang mempunyai manfaat perlindungan terhadap taman nasional,

manfaat sosial-ekonomi pada masyarakat lokal, fungsi jasa lingkungan pada daerah lainnya sehingga pengelolaan daerah penyangga merupakan usaha untuk menjamin keberhasilan pengelolaan Taman Nasional disatu pihak dan menciptakan kestabilan sosial ekonomi masyarakat di daerah penyangga yang harmonis dan dinamis di pihak lain.

Daerah penyangga yang didefinisikan pada pasal 16 ayat 2 UU No. 5 1999 sebagai areal atau wilayah yang berada di luar dan berbatasan (*boundary*) dengan kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam dan kawasan konservasi lain) yang berfungsi sebagai penyangga kawasan konservasi dari berbagai macam gangguan yang dapat berasal dari kegiatan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh satwa liar yang berasal dari dalam kawasan (Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 1986). Adapun pengelolaan daerah penyangga berada di luar otoritas manajemen kawasan konservasi (Basuni 2003) walaupun pengelolaan daerah penyangga dapat diserahkan pada otoritas pengelola kawasan konservasi jika tanah pada daerah penyangga merupakan tanah negara (Amir, 1993).

Pengelolaan daerah penyangga lebih banyak bersangkutan dengan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karenanya pengelolaan daerah penyangga akan sangat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan (Basuni 2003). Dengan demikian, pengelolaan daerah penyangga tidak akan mencapai kinerja yang diharapkan jika faktor kelembagaan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Argumen dasar dari program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah atau pihak lainnya seringkali didasarkan kepada asumsi bahwa masalah kemiskinan terletak pada internal masyarakat bukan persoalan ketimpangan struktural, hal ini terjadi diantaranya karena kelembagaan-kelembagaan formal dan

informal di masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya. Fakta lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi secara khusus masyarakat pada daerah penyangga TNGHS, saat ini dihadapkan pada persoalan kemiskinan yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Sebagai akibat dari kemiskinan tersebut, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA yang dimiliki pada daerah penyangga TNGHS. Kelembagaan-kelembagaan masyarakat yang ada pada daerah tersebut dalam bentuk formal dan informal kurang mampu mengambil peran penting dalam upaya pembangunan. Penyebab kemiskinan yang kompleks dan saling berhubungan sebab akibat dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kesejahteraan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*).

Hal yang sama terjadi pada kawasan TNGHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) dimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti program jaring pengaman sosial (JPS) dalam bentuk Program pengembangan kecamatan dimana salah satu tujuannya adalah untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan melindungi lingkungan hidup belum dapat mencapai sasaran yang diinginkan karena dalam proses pelaksanaan terjadi ketimpangan dalam individu sasaran sehingga mengakibatkan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut tidak mencapai sasarannya. Program lainnya dilakukan dengan model kampung konservasi yang dilakukan pendampingannya oleh JICA berkerjasama dengan Departemen Kehutanan pada masyarakat adat dan non adat di daerah penyangga TNGHS dan Program pengembangan ekowisata di desa Citalahab sebagai program pembinaan masyarakat belum memperlihatkan hasil

yang memadai yang disebabkan proses tersebut masih merupakan identifikasi terhadap model pengembangan kampung konservasi yang dilakukan.

Kelembagaan/*institution* adalah pengaturan atau 'aturan main' yang membentuk perilaku anggota masyarakat dan mencakup pemahaman umum mengenai bagaimana permasalahan dapat diselesaikan melalui kelembagaan (Chusak, 1996). Lebih lanjut, kelembagaan dalam penelitian ini merespon perubahan yang terjadi pada pengaturan sumberdaya yang dilakukan oleh komunitas lokal terhadap tekanan eksternal dan kondisi lingkungan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji hubungan antara karakteristik sosial ekonomi dan sistem sumberdaya yang terdapat di daerah kawasan penyangga TNGHS dengan persepsi terhadap kelembagaan.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi dan sistem sumberdaya dengan kelembagaan masyarakat pada daerah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah penyangga TNGHS.
2. Mendeskripsikan karakteristik sistem sumberdaya pada daerah penyangga TNGHS.
3. Menganalisis karakteristik kelembagaan masyarakat pada daerah penyangga TNGHS.
4. Mengetahui hubungan antara sistem sumberdaya dan karakteristik kelembagaan masyarakat.
5. Menganalisis hubungan karakteristik responden, sistem sumberdaya dan persepsi terhadap kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini mengambil lokasi pada daerah penyangga TNGHS yang secara administratif berada pada wilayah Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor) dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2006 sampai Februari 2007.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dan *grounded study* dimana dalam pelaksanaannya penelitian ini berusaha untuk menggali fakta aktual dari kelembagaan masyarakat dan potensi pengembangannya.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pengamatan langsung dan tidak langsung.

Data primer

Data primer dikumpulkan melalui metode survei lapang (*visual recall*) kondisi sumberdaya, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan, serta data pemanfaatan lahan saat ini. Data lain diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan responden.

Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh institusi terkait. Dokumen ini berupa buku, hasil penelitian, laporan hasil pertemuan (diskusi, workshop, seminar) dan lain sebagainya.

Variabel yang Diamati

Dalam penelitian ini diukur 4 (empat) peubah utama dan dikumpulkan datanya, yaitu: karakteristik sistem sumberdaya (KS), karakteristik kelembagaan (KG), sistem kelembagaan (PK) dan lingkungan eksternal (LE).

Metode Pemilihan Lokasi dan Responden

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bogor, Lebak dan Sukabumi. Selanjutnya dari kecamatan terpilih yakni Kecamatan Tenjolaya, Sobang dan Kalapa Nunggal dipilih masing-masing satu desa dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berada atau berbatasan dengan daerah penyangga TNGHS.
2. Pernah mendapatkan bantuan pendampingan program pemberdayaan baik dari pemerintah maupun LSM.

Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut terpilih 3 desa yakni Desa Tapos 1 (Kec. Tenjolaya), Desa Cirompang (Kec. Sobang) dan Desa Pulosari (Kec. Kalapa Nunggal).

Pemilihan responden kelompok masyarakat sebagai bagian utama dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Dari setiap desa diambil sebanyak 30 responden, sehingga total jumlah responden adalah sebanyak 90 kepala keluarga. Penentuan sampel sebanyak 30 untuk setiap desa didasarkan pada kebutuhan analisis statistik non parametrik yang menggunakan data kualitatif (Black & Champion, 1999). Kondisi sampel yang diambil merupakan bagian komunitas kunci pada masyarakat.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik inferensia.

Data yang berasal dari pertanyaan tertutup dianalisis dengan metode tabulasi dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, persentasi dan rataan. Untuk mengetahui jenis pendapat dan persepsi data dan informasi data ditampilkan secara deskriptif. Sementara itu, untuk menganalisis hubungan karakteristik responden, sistem sumberdaya dan persepsi terhadap kelembagaan digunakan analisis korelasi Spearman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Secara keseluruhan, rata-rata umur responden adalah 44 tahun dengan kisaran usia antara 24 tahun hingga 70 tahun. Persentase terbanyak (27.8%) responden berada pada kelompok umur 41-50 tahun. Rata-rata jumlah anggota keluarga responden adalah 4.58 orang dengan persentase terbesar (51.1%) berada pada kategori kurang dari atau sama dengan 4 anggota keluarga. Lebih dari setengah responden yakni 58.9 persen dalam penelitian ini bekerja sebagai petani. Persentase terbanyak (70.0%) tingkat pendidikan responden adalah SD dan SLTP

yang termasuk dalam kategori pendidikan rendah

Rata-rata tingkat pendapatan responden tergolong kecil yakni Rp 172,758.60/kapita/bulan (Tabel 1). Jika dilihat berdasarkan kategorinya, ternyata sebanyak 46.7 persen responden tergolong dalam kategori pendapatan Rp 100.001 - 200.000/kapita/bulan. Selanjutnya tingkat pendapatan responden tersebut jika dibandingkan dengan garis kemiskinan Indonesia yakni sebesar Rp 152.847/kapita/bulan untuk Indonesia masih di atas ambang batas (Susenas Panel Maret 2006). Ternyata sebanyak 55.6 persen responden masih berada di bawah garis kemiskinan. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana yang ada, terutama aksesibilitas jalan yang masih jelek yang tentunya sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan status tempat tinggal, sebagian besar (98.9%) responden adalah merupakan milik sendiri (Tabel 2). Hanya 1 orang responden yang tempat tinggalnya masih menumpang. Kepemilikan lahan sendiri oleh petani memungkinkan pengolahan yang lebih fleksibel dan pendapatan secara penuh adalah untuk petani itu sendiri.

Tabel 1 Sebaran responden berdasarkan kategori tingkat pendapatan

| No | Kategori pendapatan (Rp/kapita/bulan) | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|---------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1 | < Rp100.0000 | 25 | 27.8 |
| 2 | Rp 100.001 - 200.000 | 42 | 46.7 |
| 3 | Rp 200.001 - 300.000 | 12 | 13.3 |
| 4 | Rp 300.001 - 400.000 | 10 | 11.1 |
| 5 | Rp 400.001 - 500.000 | 1 | 1.1 |
| Total | | 90 | 100.0 |
| Rata-rata ± SD | | 172,758.60 ± 101,746.12 | |
| Kisaran (Min, Max) | | 26,250.00 - 466,667.00 | |
| Kategori kemiskinan | | | |
| 1 | Di bawah garis kemiskinan (<=Rp152.847) | 50 | 55.6 |
| 2 | Di atas garis kemiskinan (>Rp152.847) | 40 | 44.4 |

Tabel 2 Sebaran responden berdasarkan status tempat tinggal

| No | Status tempat tinggal | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|----|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | Milik sendiri | 89 | 98.9 |
| 2 | Menumpang | 1 | 1.1 |
| | Total | 90 | 100.0 |

Karakteristik Sistem Sumberdaya

Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki saat ini disajikan pada Tabel 3. Terlihat pada tabel tersebut bahwa lebih dari setengah (56.7%) responden status kepemilikan lahan/tanahnya adalah dari jual/beli. Sementara yang berikutnya adalah berasal dari warisan, pemberian atau sewa.

Semua responden dalam penelitian ini menempati lahan tersebut secara permanen (ditinggali) (Tabel 4). Pemanfaatan lahan akan lebih optimal dengan sifat tinggal yang permanen.

Sebagian besar (87.8%) responden telah memiliki lahan lebih dari 10 tahun (Tabel 5). Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman responden dalam mengolah tanahnya baik sendiri maupun digarap oleh orang lain sudah lebih dari 10 tahun pula. Untuk Kabupaten Bogor, jika ditelusuri perkembangannya maka terjadi penurunan luas penggunaan lahan tegal/kebun sebesar 1.257 ha karena terjadi alih fungsi lahan yang sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya. Alih fungsi lahan ini akan berdampak terhadap menurunnya aktivitas ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan lahan.

Tabel 3 Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki saat ini (jawaban bisa lebih dari satu)

| No | Status kepemilikan lahan/tanah | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|----|--------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Warisan | 35 | 38.9 |
| 2 | Jual/beli | 51 | 56.7 |
| 3 | Pemberian | 3 | 3.3 |
| 4 | Sewa | 1 | 1.1 |
| | Total | 90 | 100.0 |

Tabel 4 Sebaran responden berdasarkan kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki saat ini ditempati secara permanen (ditinggali)

| No | Lahan ditempati permanen | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|----|--------------------------|------------|----------------|
| 1 | Ya | 90 | 100.0 |
| 2 | Tidak | 0 | 0.0 |
| | Total | 90 | 100.0 |

Tabel 5 Sebaran responden berdasarkan lama memiliki lahan

| No | Lama memiliki lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|-------|---------------------|------------|----------------|
| 1 | Lebih dari 10 tahun | 79 | 87.8 |
| 2 | >5-10 tahun | 4 | 4.4 |
| 3 | >3-5 tahun | 5 | 5.6 |
| 4 | 1-3 tahun | 1 | 1.1 |
| 5 | < 1 tahun | 1 | 1.1 |
| Total | | 90 | 100.0 |

Jarak tempat tinggal dari hutan pada sebagian besar (56.7%) responden adalah termasuk dekat (< 2 jam) (Tabel 6). Sisanya yakni 31.1 persen jarak tempat tinggalnya termasuk kategori sedang (2-4 jam) dari hutan dan 12.2 persen tergolong jauh (> 4 jam) dari hutan. Jarak yang semakin dekat dengan hutan membuat pemanfaatan sumberdaya hutan akan semakin intensif. Jarak tempat tinggal masyarakat yang cukup dekat dengan kawasan hutan TNGHS menyebabkan sering terjadinya kegiatan pemanfaatan/pengambilan hasil hutan dari kawasan TNGHS, terutama kebutuhan hidup

minimum sehari-hari masyarakat tidak terpenuhi dari hasil pertanian.

Persentase terbanyak (57.8%) penguasaan lahan responden adalah tergolong sempit (< 0.25 ha) (Tabel 7). Berikutnya kepemilikan lahan terbanyak kedua (28.9%) adalah tergolong sedang (0.25-0.5 ha). Penguasaan lahan sempit mengakibatkan kesempatan menanam jenis sumberdaya yang dibutuhkan kecil dan sumberdaya tersedia dalam jumlah sedikit. Penguasaan lahan sedang memungkinkan kesempatan menanam sumberdaya yang dibutuhkan relatif lebih besar.

Tabel 6 Sebaran responden berdasarkan jarak tempat tinggal dari hutan

| No | Jarak tempat tinggal dari hutan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|-------|---------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Dekat (< 2 jam) | 51 | 56.7 |
| 2 | Sedang (2-4 jam) | 28 | 31.1 |
| 3 | Jauh (> 4 jam) | 11 | 12.2 |
| Total | | 90 | 100.0 |

Tabel 7 Sebaran responden berdasarkan luas penguasaan lahan

| No | Luas penguasaan lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|-------|-----------------------|------------|----------------|
| 1 | Sempit (< 0.25 ha) | 52 | 57.8 |
| 2 | Sedang (0.25-0.5 ha) | 26 | 28.9 |
| 3 | Luas (> 0.5 ha) | 12 | 13.3 |
| Total | | 90 | 100.0 |

Sebagian besar responden termasuk jarang hingga tidak pernah pergi ke kawasan hutan (Tabel 8). Pernyataan ini terlihat dari 44.4 persen responden menyatakan jarang (<2x sebulan) dan tidak pernah mengunjungi kawasan hutan TNGHS sebanyak 40.0 persen. Berbagai kegiatan dilakukan oleh responden ketika mengunjungi kawasan hutan, diantaranya adalah mengambil hasil hutan oleh 24.4 persen responden dan membetulkan saluran irigasi oleh 20.0 persen responden.

Sebagian besar (74.4%) responden menyatakan menyadari dampak akibat kegiatannya, sementara sisanya yakni sebanyak 25.6 persen belum menyadari dampak akibat kegiatan di TNGHS. Sementara itu, dalam upaya mendukung

pelestarian sumberdaya taman nasional, ada berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat yakni mengikuti kegiatan penghijauan di sekitar/ luar TNGHS (36.7%), menyebarluaskan informasi keberadaan TNGHS dan aturan-aturannya serta mengajak masyarakat untuk turut serta melestarikan hutan TNGHS (13.3%) dan mengikuti penyuluhan/ sarasehan tentang TNGHS (7.8%). Dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan TNGHS, bentuk pengelolaan yang diinginkan masyarakat adalah dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya. Meskipun demikian, ada segelintir responden yakni 23.3 persen yang menyatakan tidak tahu bentuk pengelolaan TNGHS yang diinginkannya.

Tabel 8 Sebaran responden berdasarkan kegiatan, kesadaran pelestarian dan pengelolaan TNGHS

| No | Kegiatan ke TNGHS | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|---|--|------------|----------------|
| Frekuensi ke kawasan hutan (TNGHS) | | | |
| 1 | Sering (minimal 2x sebulan) | 14 | 15.6 |
| 2 | Jarang (<2x sebulan) | 40 | 44.4 |
| 3 | Tidak pernah | 36 | 40.0 |
| Kegiatan yang dilakukan di TNGHS (jawaban lebih dari satu) | | | |
| 1 | Mengambil hasil hutan | 22 | 24.4 |
| 2 | Rekreasi memandu wisata | 2 | 2.2 |
| 3 | Melintas ke kampung lain | 17 | 18.9 |
| 4 | Membetulkan saluran irigasi | 18 | 20.0 |
| 5 | Tidak pernah | 36 | 40.0 |
| Kesadaran tentang kegiatan di TNGHS | | | |
| 1 | Menyadari dampak | 67 | 74.4 |
| 2 | Belum menyadari dampak | 23 | 25.6 |
| Kegiatan mendukung pelestarian SDH TNGHS (jawaban dapat lebih dari satu) | | | |
| 1 | Mengikuti kegiatan penghijauan di sekitar /luar TNGH | 33 | 36.7 |
| 2 | Mengikuti penyuluhan/ sarasehan tentang TNGHS | 7 | 7.8 |
| 3 | Mengajak masyarakat turut melestarikan hutan TNGHS | 12 | 13.3 |
| 4 | Tidak pernah | 36 | 40.0 |
| Bentuk pengelolaan TNGHS yang diinginkan masyarakat | | | |
| 1 | Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaannya | 69 | 76.7 |
| 2 | Tidak tahu | 21 | 23.3 |

Secara umum, sebagian besar responden menyatakan bahwa ukuran sumberdaya/lahan, kepemilikan sumberdaya lahan, intensitas pengolahan lahan dan kemungkinan penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan adalah penting (Tabel 9).

Status kepemilikan sumberdaya/ lahan yang digunakan oleh sebagian besar (83.3%) responden adalah milik sendiri (Tabel 10). Sisanya merupakan sewa (12.2%), milik negara (3.3%) ataupun menggarap lahan orang lain (1.1%).

Adapun rata-rata luas lahan yang digunakan responden untuk bekerja adalah 0.37 hektar dengan kisaran 0 hingga 3 hektar

(Tabel 11). Intensitas pengolahan lahan berkisar antara 1 sampai 4 kali setahun dengan rata-rata 1.83 kali setahun. Sementara itu, persentase penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan yang digunakan responden adalah 56.01 persen dengan kisaran 10 hingga 100 persen. Penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan yang dilakukan responden diantaranya adalah pemanfaatan lahan yang ada di kawasan TNGHS untuk lahan pertanian ataupun oleh masyarakat di luar responden yang membangun villa-villa atau gubuk-gubuk liar yang seharusnya tidak boleh dilakukan di kawasan tersebut.

Tabel 9 Sebaran responden berdasarkan karakteristik sistem sumberdaya

| Persepsi terhadap karakteristik sistem sumberdaya | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|---|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Ukuran sumberdaya/lahan | 28 | 31.1 | 58 | 64.4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.0 |
| 2. Kepemilikan sumberdaya lahan | 21 | 23.3 | 65 | 72.2 | 4 | 4.4 | 0 | 0.0 |
| 3. Intensitas pengolahan lahan | 8 | 8.9 | 60 | 66.7 | 22 | 24.4 | 0 | 0.0 |
| 4. Kemungkinan penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan | 5 | 5.6 | 54 | 60.0 | 31 | 34.4 | 0 | 0.0 |

Tabel 10 Sebaran responden berdasarkan status kepemilikan sumberdaya/lahan

| No | Status kepemilikan sumberdaya/lahan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|----|-------------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Milik sendiri | 75 | 83.3 |
| 2 | Sewa | 11 | 12.2 |
| 3 | Milik negara | 3 | 3.3 |
| 4 | Menggarap lahan orang lain | 1 | 1.1 |
| | Total | 90 | 100.0 |

Tabel 11 Analisis deskriptif karakteristik sumberdaya lahan

| Karakteristik sumberdaya lahan | Rata-rata | SD | Minimum | Maksimum |
|--|-----------|-------|---------|----------|
| 1. Luas lahan yang digunakan untuk bekerja(ha) | 0.37 | 0.49 | 0.00 | 3.00 |
| 2. Intensitas pengolahan lahan (kali/tahun) | 1.83 | 0.62 | 1.00 | 4.00 |
| 3. Persentase penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan (%) | 56.01 | 26.47 | 10.00 | 100.00 |

Karakteristik Kelembagaan

Persepsi responden terhadap karakteristik kelembagaan yang mencakup jumlah anggota organisasi (50.0%), adanya batasan keanggotaan (53.3%), aturan yang dipergunakan (71.1%), pola kepemimpinan dalam organisasi/kelompok (51.1%), saling ketergantungan antara anggota organisasi/kelompok (70.0%), homogenitas identitas dan kepentingan (73.3%), kemampuan mendapatkan pembiayaan dalam melakukan

kegiatan bersama (61.1%) dan tingkat pendapatan anggota (66.7%) adalah tergolong penting (Tabel 12). Pengalaman keberhasilan masa lalu dianggap sebagian besar (48.9%) responden cukup penting. Ukuran yang kecil dari sumberdaya dan grup, rendahnya level mobilitas dari sumberdaya, dan rendahnya level artikulasi dengan pasar akan mendorong tingginya level saling ketergantungan antara anggota grup (Agrawal, 2001).

Tabel 12 Sebaran responden berdasarkan karakteristik kelembagaan

| Persepsi terhadap karakteristik kelembagaan | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|--|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Jumlah anggota organisasi | 6 | 6.7 | 45 | 50.0 | 38 | 42.2 | 1 | 1.1 |
| 2. Batasan keanggotaan | 5 | 5.6 | 48 | 53.3 | 37 | 41.1 | 0 | 0.0 |
| 3. Aturan yang dipergunakan | 17 | 18.9 | 64 | 71.1 | 9 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| 4. Pengalaman keberhasilan masa lalu | 2 | 2.2 | 43 | 47.8 | 44 | 48.9 | 1 | 1.1 |
| 5. Pola kepemimpinan dalam organisasi/kelompok | 27 | 30.0 | 46 | 51.1 | 17 | 18.9 | 0 | 0.0 |
| 6. Saling ketergantungan antara anggota kelompok | 5 | 5.6 | 63 | 70.0 | 22 | 24.4 | 0 | 0.0 |
| 7. Homogenitas identitas dan kepentingan | 6 | 6.7 | 66 | 73.3 | 17 | 18.9 | 1 | 1.1 |
| 8. Kemampuan mendapat pembiayaan untuk kegiatan | 21 | 23.3 | 55 | 61.1 | 13 | 14.4 | 1 | 1.1 |
| 9. Tingkat pendapatan anggota | 18 | 20.0 | 60 | 66.7 | 12 | 13.3 | 0 | 0.0 |

Rata-rata jumlah anggota dalam organisasi/kelompok yang diikuti adalah 35 orang dengan kisaran antara 10 hingga 89 orang (Tabel 13). Sementara itu, pengalaman keberhasilan masa lalu yang pernah diperoleh organisasi/kelompok rata-rata 2 buah dengan kisaran 1 hingga 3 prestasi. Rata-rata pendapatan anggota organisasi/kelompok adalah Rp 412,500.00/kelompok dengan kisaran Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00.

Sebanyak 50 persen responden menyatakan bahwa aturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok yang diikutinya sudah baik (Tabel 14). Batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok dianggap oleh sebagian besar (65.6%) responden sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat 3.3 persen responden yang menyatakan batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok masih tidak baik. Menurut setengah responden, saling ketergantungan antara anggota dalam organisasi/kelompok tergolong cukup tinggi. Bahkan sebanyak 43.3 persen responden menyatakan saling ketergantungan antara anggota dalam organisasi/kelompok yang diikuti tergolong tinggi hingga sangat tinggi. Hanya 6.7 persen responden yang menganggap ketergantungan antar anggota

organisasi tidak tinggi. Homogenitas identitas dan kepentingan dalam organisasi/kelompok bagi sebagian besar (54.4%) responden tergolong dalam kategori cukup sering. Dengan proporsi yang hampir berimbang yakni sekitar 40 persen, kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/kelompok dinilai masing-masing cukup baik dan tidak baik. Dengan demikian, pembiayaan dari organisasi/kelompok masih belum memuaskan bagi dua perlima responden.

Secara keseluruhan, pada semua komponen persepsi terhadap sistem kelembagaan yang mencakup adanya adanya aturan yang sederhana dan mudah dipahami, adanya akses dan aturan manajemen yang dibuat secara lokal, adanya kemudahan dalam melaksanakan aturan, adanya sanksi bertahap, akuntabilitas staf yang melakukan monitoring bagi pengguna dan hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan dianggap oleh sebagian besar responden adalah penting (Tabel 15). Hal ini sejalan dengan pendapat Agrawal (2001) keefektifan kelembagaan dalam manajemen dan alokasi sumberdaya sangat ditentukan oleh besar kecilnya grup dan aturan anggota dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Tabel 13 Analisis deskriptif komponen lingkungan eksternal

| Lingkungan eksternal | Rata-rata | SD | Minimum | Maksimum |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| 1. Jumlah anggota kelompok (jiwa) | 34.70 | 21.34 | 10.00 | 89.00 |
| 2. Pengalaman keberhasilan masa lalu (jumlah) | 1.83 | 1.33 | 1.00 | 4.00 |
| 3. Pendapatan rata-rata anggota kelompok (Rp/kelompok) | 412,500.00 | 189,738.51 | 100,000.00 | 1,000,000.00 |

Tabel 14 Sebaran responden berdasarkan karakteristik kelembagaan

| No | Karakteristik kelembagaan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|---|---------------------------|------------|----------------|
| Aturan yang dipergunakan | | | |
| 1 | Sangat baik | 1 | 1.1 |
| 2 | Baik | 45 | 50.0 |
| 3 | Cukup baik | 44 | 48.9 |
| Batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok | | | |
| 1 | Baik | 28 | 31.1 |
| 2 | Cukup baik | 59 | 65.6 |
| 3 | Tidak baik | 3 | 3.3 |
| Saling ketergantungan antara anggota | | | |
| 1 | Sangat tinggi | 2 | 2.2 |
| 2 | Tinggi | 37 | 41.1 |
| 3 | Cukup tinggi | 45 | 50.0 |
| 4 | Tidak tinggi | 6 | 6.7 |
| Homogenitas identitas dan kepentingan | | | |
| 1 | Sangat sering | 3 | 3.3 |
| 2 | Sering | 30 | 33.3 |
| 3 | Cukup sering | 49 | 54.4 |
| 4 | Tidak sering | 8 | 8.9 |
| Kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/kelompok | | | |
| 1 | Sangat baik | 1 | 1.1 |
| 2 | Baik | 14 | 15.6 |
| 3 | Cukup baik | 37 | 41.1 |
| 4 | Tidak baik | 36 | 40.0 |
| 5 | Sangat tidak baik | 2 | 2.2 |

Tabel 15 Sebaran responden berdasarkan pengaturan kelembagaan

| Persepsi terhadap pengaturan kelembagaan | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|--|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Aturan sederhana dan mudah dipahami | 17 | 18.9 | 64 | 71.1 | 9 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| 2. Akses dan aturan manajemen yang dibuat lokal | 29 | 32.2 | 57 | 63.3 | 4 | 4.4 | 0 | 0.0 |
| 3. Kemudahan dalam melaksanakan aturan | 7 | 7.8 | 67 | 74.4 | 16 | 17.8 | 0 | 0.0 |
| 4. Adanya sanksi bertahap | 9 | 10.0 | 54 | 60.0 | 25 | 27.8 | 2 | 2.2 |
| 5. Akuntabilitas staf monitoring | 8 | 8.9 | 64 | 71.1 | 18 | 20.0 | 0 | 0.0 |
| 6. Hubungan sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan | 2 | 2.2 | 61 | 67.8 | 27 | 30.0 | 0 | 0.0 |

Rata-rata tingkat akses dan aturan manajemen yang dibuat secara lokal adalah 76.43 persen dengan kisaran 45 sampai 99 persen (Tabel 16). Sementara itu rata-rata tingkat kemudahan dalam melaksanakan aturan adalah sebesar 68.98 persen dengan kisaran 25 sampai 90 persen. Rata-rata tingkat sanksi bertahap adalah 67.75 persen dengan kisaran 40 sampai 100 persen. Tingkat akuntabilitas staf yang melakukan monitoring bagi pengguna adalah 64.97 persen dengan kisaran 30 sampai 90 persen. Sedangkan rata-rata tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan adalah sebesar 63.85 persen dengan

kisaran 30 sampai 80 persen. Dengan demikian, dalam sistem kelembagaan yang ada di lokasi penelitian, komponen yang paling perlu untuk ditingkatkan adalah tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan.

Persepsi responden terhadap faktor lingkungan eksternal teknologi menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan penting untuk semua komponennya yakni kebutuhan waktu untuk adaptasi dengan teknologi baru, ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah dan penyelesaian kendala dari penerapan teknologi (Tabel 17).

Tabel 16 Sebaran responden berdasarkan pengaturan kelembagaan

| Pengaturan kelembagaan (Persen) | Rata-rata | SD | Minimum | Maksimum |
|--|-----------|-------|---------|----------|
| 1. Tingkat akses dan aturan manajemen secara lokal (%) | 76.43 | 11.61 | 45.00 | 99.00 |
| 2. Tingkat kemudahan melaksanakan aturan (%) | 68.98 | 10.59 | 25.00 | 90.00 |
| 3. Tingkat sanksi bertahap (%) | 67.75 | 10.99 | 40.00 | 100.00 |
| 4. Tingkat akuntabilitas staf monitoring (%) | 64.97 | 9.97 | 30.00 | 90.00 |
| 5. Tingkat hubungan sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan (%) | 63.85 | 10.53 | 30.00 | 80.00 |

Tabel 17 Sebaran responden berdasarkan lingkungan eksternal teknologi

| Persepsi terhadap lingkungan eksternal teknologi | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|--|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah | 39 | 43.3 | 46 | 51.1 | 3 | 3.3 | 2 | 2.2 |
| 2. Kebutuhan waktu adaptasi dengan teknologi baru | 10 | 11.1 | 62 | 68.9 | 16 | 17.8 | 2 | 2.2 |
| 3. Penyelesaian kendala dari penerapan teknologi | 18 | 20.0 | 47 | 52.2 | 25 | 27.8 | 0 | 0.0 |

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya bantuan finansial dan sosial dari pemerintah untuk mengkompensasi pengguna lokal untuk aktivitas konservasi yang dinilai sangat penting oleh sebagian besar (68.9%) responden (Tabel 18). Sementara itu, adanya kontrol pemerintah terhadap otoritas lokal dan adanya sanksi peraturan pemerintah dalam penggunaan lahan dianggap penting oleh sebagian besar responden. Sedangkan persepsi terhadap adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pada tingkat desa disikapi beragam oleh sebagian besar responden mulai dari cukup penting hingga sangat penting. Adanya sebagian masyarakat yang

beranggapan peran pemerintah tidak terlalu penting terhadap kewenangan otoritas desa dimungkinkan ketidakinginan terkungkung dalam birokrasi yang rumit.

Rata-rata persentase tingkat ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah adalah 36.05 persen dengan kisaran antara 10 hingga 90 persen (Tabel 19). Sementara itu, rata-rata waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru adalah 1.91 bulan dengan kisaran antara 0 hingga 12 bulan. Rata-rata jumlah bantuan pemerintah pada organisasi/ kelompok Rp 14.533.333,33 dengan kisaran antara Rp 500.000,00 hingga Rp 50.000.000,00.

Tabel 18 Sebaran responden berdasarkan lingkungan eksternal negara

| Persepsi terhadap kelembagaan | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|---|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Kontrol pemerintah terhadap otoritas lokal | 21 | 23.3 | 42 | 46.7 | 27 | 30.0 | 0 | 0.0 |
| 2. Sanksi peraturan pemerintah dalam penggunaan lahan | 18 | 20.0 | 49 | 54.4 | 22 | 24.4 | 1 | 1.1 |
| 3. Bantuan finansial dan sosial pemerintah mengkompensasi pengguna lokal untuk aktivitas konservasi | 62 | 68.9 | 26 | 28.9 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 4. Penyerahan kewenangan pemerintah kepada desa | 23 | 25.6 | 27 | 30.0 | 33 | 36.7 | 7 | 7.8 |

Tabel 19 Analisis deskriptif komponen lingkungan eskternal

| Lingkungan eksternal | Rata-rata | SD | Minimum | Maksimum |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1. Tingkat ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah (%) | 36.05 | 22.84 | 10.00 | 90.00 |
| 2. Lama adaptasi dengan teknologi baru (bulan) | 1.91 | 2.09 | 0.00 | 12.00 |
| 3. Bantuan pemerintah pada kelompok (Rp/Kelompok) | 14,533,333.33 | 16,370,390.86 | 500,000.00 | 50,000,000.00 |

Teknologi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kelembagaan dianggap oleh sebagian besar (62.2%) responden adalah cukup besar kendala dan penerapannya (Tabel 20). Sementara itu, sebanyak 57.8 persen responden menyatakan bahwa kontrol

pemerintah terhadap otoritas lokal masih cukup besar. Sedangkan tingkat sanksi terhadap anggota dalam organisasi kelompok oleh sebagian besar (60.0%) responden termasuk tidak sering.

Tabel 20 Sebaran responden berdasarkan kendala dan penerapan teknologi

| No | Lingkungan eksternal | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|--|----------------------|------------|----------------|
| Kendala dan penerapan teknologi | | | |
| 1 | Sangat besar | 9 | 10.0 |
| 2 | Besar | 19 | 21.1 |
| 3 | Cukup besar | 56 | 62.2 |
| 4 | Tidak besar | 5 | 5.6 |
| 5 | Sangat tidak besar | 1 | 1.1 |
| Kontrol pemerintah terhadap otoritas lokal | | | |
| 1 | Sangat besar | 0 | 0.0 |
| 2 | Besar | 11 | 12.2 |
| 3 | Cukup besar | 52 | 57.8 |
| 4 | Tidak besar | 22 | 24.4 |
| 5 | Sangat tidak besar | 5 | 5.6 |
| Tingkat sanksi terhadap anggota dalam organisasi kelompok | | | |
| 1 | Sangat sering | 0 | 0.0 |
| 2 | Sering | 7 | 7.8 |
| 3 | Cukup sering | 28 | 31.1 |
| 4 | Tidak sering | 54 | 60.0 |
| 5 | Sangat tidak sering | 1 | 1.1 |

Hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik kelembagaan

Tingkat ketergantungan anggota pada sistem sumberdaya, persepsi atas keadilan dalam alokasi manfaat dari sumberdaya, sikap dan tingkat tuntutan anggota dan perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan dianggap oleh masing-masing 64.4 persen, 77.8 persen,

60.0 persen dan 46.7 persen responden adalah penting (Tabel 21).

Tingkat ketergantungan antara anggota pada sistem sumberdaya dari sebagian besar (66.7%) responden tergolong cukup tinggi (Tabel 22). Sementara itu, sebanyak 7.8 persen responden menyatakan bahwa tingkat ketergantungan antara anggota pada sistem sumberdaya tergolong tidak tinggi/sangat tidak tinggi.

Tabel 21 Sebaran responden berdasarkan hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik organisasi

| Persepsi terhadap hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik organisasi | Sangat penting | | Penting | | Cukup penting | | Tidak penting | |
|--|----------------|------|---------|------|---------------|------|---------------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1. Tingkat ketergantungan pada sistem sumberdaya | 4 | 4.4 | 58 | 64.4 | 28 | 31.1 | 0 | 0.0 |
| 2. Persepsi keadilan alokasi manfaat sumberdaya | 11 | 12.2 | 70 | 77.8 | 9 | 10.0 | 0 | 0.0 |
| 3. Sikap dan tingkat tuntutan anggota | 7 | 7.8 | 54 | 60.0 | 28 | 31.1 | 1 | 1.1 |
| 4. Perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan | 9 | 10.0 | 42 | 46.7 | 39 | 43.3 | 0 | 0.0 |

Tabel 22 Sebaran responden berdasarkan hubungan antara karakteristik sistem sumberdaya dan karakteristik kelembagaan

| No | Hubungan karakteristik sistem sumberdaya dan kelembagaan | Jumlah (n) | Persentase (%) |
|--|--|------------|----------------|
| Tingkat ketergantungan antara anggota pada sistem sumberdaya | | | |
| 1 | Tinggi | 23 | 25.6 |
| 2 | Cukup tinggi | 60 | 66.7 |
| 3 | Tidak tinggi | 6 | 6.7 |
| 4 | Sangat tidak tinggi | 1 | 1.1 |
| Persepsi atas keadilan dalam alokasi manfaat dari sumberdaya | | | |
| 1 | Adil | 37 | 41.1 |
| 2 | Cukup adil | 52 | 57.8 |
| 3 | Tidak adil | 1 | 1.1 |
| Sikap dan tingkat tuntutan anggota | | | |
| 1 | Sangat tinggi | 9 | 10.0 |
| 2 | Tinggi | 46 | 51.1 |
| 3 | Cukup tinggi | 32 | 35.6 |
| 4 | Tidak tinggi | 3 | 3.3 |
| Perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan | | | |
| 1 | Sangat tinggi | 4 | 4.4 |
| 2 | Tinggi | 24 | 26.7 |
| 3 | Cukup tinggi | 59 | 65.6 |
| 4 | Tidak tinggi | 3 | 3.3 |

Persepsi atas keadilan dalam alokasi manfaat dari sumberdaya dianggap oleh 98.9 persen responden termasuk cukup adil/adil. Sebanyak 51.1 persen responden menyatakan bahwa sikap dan tingkat tuntutan anggota adalah termasuk kategori cukup tinggi. Persentase terbesar (65.6%) responden menyatakan bahwa perubahan sikap dan perilaku terhadap perubahan penggunaan lahan adalah tergolong cukup tinggi. Penyimpangan manfaat dari sumberdaya lahan yang dilakukan responden diantaranya adalah pemanfaatan lahan yang ada di kawasan TNGHS untuk lahan pertanian ataupun oleh masyarakat di luar responden yang membangun villa-villa atau gubuk-gubuk liar yang seharusnya tidak boleh dilakukan di kawasan tersebut.

Analisis Korelasi Spearman karakteristik responden, sistem sumberdaya dan persepsi terhadap kelembagaan

Hasil analisis korelasi Spearman untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara karakteristik responden dan sumberdaya dengan persepsi terhadap kelembagaan disajikan pada Tabel 23. Terdapat hubungan yang positif nyata antara tingkat pendidikan dan jarak tempat tinggal dari hutan dengan persepsi terhadap tingkat kepentingan kelembagaan secara umum. Artinya dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan semakin jauh jarak tempat tinggal responden dari hutan, maka persepsi tentang pentingnya kelembagaan akan semakin tinggi. Jika dilihat per kelompok persepsi, maka karakteristik sistem sumberdaya berhubungan positif nyata dengan jarak tempat tinggal dari hutan, pendapatan dan frekuensi mengolah lahan. Hal ini berarti semakin jauh jarak tempat tinggal responden dari hutan, semakin tinggi tingkat pendapatan responden dan semakin sering responden mengolah lahan maka persepsi terhadap pentingnya karakteristik sistem sumberdaya akan semakin baik. Sementara itu, jarak tempat

tinggal dari hutan, pendapatan responden dan pendapatan anggota organisasi/kelompok berhubungan positif nyata dengan persepsi terhadap karakteristik kelembagaan. Dengan demikian semakin jauh jarak tempat tinggal serta semakin tinggi pendapatan responden dan pendapatan organisasi/kelompok maka persepsi terhadap pentingnya karakteristik kelembagaan akan semakin baik.

Umur responden dan lama tinggal berhubungan negatif nyata dengan persepsi terhadap pentingnya pengaturan kelembagaan. Hal ini dapat dimaknai dengan umur responden yang semakin tua dan semakin lama tinggal di daerah sekarang akan membuat responden menganggap pengaturan kelembagaan kurang penting. Kemungkinan hal ini diakibatkan responden yang sudah tua dan sudah lama tinggal di daerah sekarang telah merasakan kondisi lembaga yang sudah berjalan selama ini telah berjalan dengan baik dan tidak memerlukan pengaturan. Jarak tempat tinggal dari hutan berhubungan positif nyata dengan persepsi terhadap pentingnya teknologi yang berarti kebutuhan akan teknologi lebih dibutuhkan oleh responden yang intensitasnya lebih jarang ke hutan. Sedangkan umur dan lama tinggal di daerah sekarang berhubungan negatif nyata dengan persepsi terhadap lingkungan eksternal negara yang bermakna semakin tua dan responden dan semakin lama tinggal di daerah sekarang membuat mereka beranggapan bahwa peran negara tidak terlalu penting dalam pengaturan kelembagaan maupun pengaturan pengelolaan sumberdaya. Sebaliknya frekuensi ke kawasan hutan berhubungan positif nyata dengan persepsi terhadap lingkungan eksternal negara yang bermakna semakin sering responden ke kawasan hutan, maka responden semakin menganggap penting peran negara dalam pengaturan kelembagaan dan pengaturan pengelolaan sumberdaya.

Tabel 23 Analisis korelasi Spearman karakteristik sistem sumberdaya dan persepsi kelembagaan

| Peubah | Kelembagaan | Karakteristik sistem sumberdaya | Karakteristik kelembagaan | Pengaturan kelembagaan | Lingkungan eksternal teknologi | Lingkungan eksternal negara |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Umur | -0.067 | 0.018 | 0.169 | -.212(*) | 0.037 | -.286(**) |
| Pendidikan | .258(*) | 0.090 | 0.200 | .231(*) | 0.192 | .281(**) |
| Penghasilan rata-rata per bulan | 0.058 | 0.161 | 0.182 | -0.096 | 0.127 | -0.140 |
| Lama tinggal di daerah sekarang | -0.031 | 0.049 | 0.169 | -.218(*) | 0.020 | -.232(*) |
| Jarak tempat tinggal dari hutan | .253(*) | .276(**) | .371(**) | 0.059 | .233(*) | 0.026 |
| Luas Penguasaan Lahan | 0.132 | 0.042 | 0.052 | 0.188 | 0.130 | -0.067 |
| Frekuensi ke kawasan hutan | 0.181 | 0.184 | 0.016 | 0.157 | 0.111 | .233(*) |
| Pendapatan | 0.095 | .287(**) | .213(*) | -0.105 | 0.133 | -0.049 |
| Frekuensi mengolah lahan | 0.146 | .232(*) | 0.190 | 0.034 | 0.190 | 0.034 |
| Pendapatan anggota organisasi/kelompok | 0.099 | 0.065 | .212(*) | -0.076 | 0.115 | -0.066 |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rata-rata umur responden adalah 44 tahun dengan kisaran usia antara 24 tahun hingga 70 tahun dengan tingkat pendidikan SD dan SLTP. Rata-rata tingkat pendapatan responden tergolong kecil yakni Rp 172,758.60/kapita/bulan. Status tempat tinggal responden umumnya adalah milik sendiri
2. Status kepemilikan sumberdaya/lahan yang digunakan oleh sebagian besar responden adalah sewa dengan penguasaan lahan tergolong sempit yang diperoleh dari jual/beli. Frekuensi ke kawasan hutan tergolong jarang (<2 kali sebulan) dengan kegiatan yang dilakukan adalah mengambil hasil hutan.
3. Sebagian besar responden menyatakan bahwa peraturan yang digunakan dalam

organisasi/kelompok, pola kepemimpinan dalam organisasi/ kelompok yang diikutinya dan kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/ kelompok adalah baik. Batasan peraturan yang digunakan dalam organisasi/kelompok dianggap responden sudah cukup baik. Rata-rata tingkat akses dan aturan manajemen yang dibuat secara lokal adalah 76.43%. Sementara itu rata-rata tingkat kemudahan dalam melaksanakan aturan adalah sebesar 68.98%. Rata-rata tingkat sanksi bertahap adalah 67.75%. Tingkat akuntabilitas staf yang melakukan monitoring bagi pengguna adalah 64.97%. Sedangkan rata-rata tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan adalah sebesar 63.85%. Rata-rata tingkat kesepakatan komitmen bersama dalam pembuatan aturan adalah 82.11%. Rata-rata tingkat

- penyesuaian terhadap aturan secara bertahap terhadap anggota adalah 62.78%. Rata-rata tingkat tata cara menyelesaikan perselisihan adalah 59.22%. Tingkat kemampuan pengawasan bagi penggunaan sumberdaya adalah 60.11%. Rata-rata tingkat hubungan antara sistem sumberdaya dan pengaturan kelembagaan adalah sebesar 58.50%. Rata-rata tingkat ketersediaan teknologi tepat guna berbiaya rendah adalah 36.05% dengan kisaran antara 10-90%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk beradaptasi dengan teknologi baru adalah 1.91 bulan. Rata-rata jumlah bantuan pemerintah pada organisasi/kelompok Rp 14.533.333,33.
4. Tingkat ketergantungan antara anggota dalam organisasi/kelompok tergolong cukup tinggi. Kesamaan kepentingan anggota dalam organisasi/kelompok bagi sebagian besar responden tergolong dalam kategori sering. Kemampuan mendapatkan pembiayaan dari organisasi/kelompok masuk kategori tidak baik. Rata-rata jumlah anggota dalam organisasi/kelompok yang diikuti adalah 35 orang. Rata-rata pendapatan anggota organisasi/kelompok adalah Rp 412.500.00/kelompok. Tingkat ketergantungan antara anggota grup pada sistem sumberdaya tergolong cukup tinggi. Tingkat keadilan dalam alokasi manfaat sumberdaya dianggap 59 persen responden termasuk adil. Sebagian besar responden menyatakan sikap dan tingkat permintaan anggota kelompok termasuk cukup tinggi. Perubahan sikap dan perilaku terhadap tingkat penggunaan lahan adalah tergolong cukup tinggi.
 5. Persepsi terhadap kelembagaan berhubungan positif nyata dengan tingkat pendidikan dan jarak tempat tinggal dari hutan. Artinya dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan semakin jauh jarak tempat tinggal responden dari hutan, maka persepsi

tentang pentingnya kelembagaan akan semakin tinggi.

Saran

1. Pengembangan masyarakat di daerah penyangga Taman Nasional harus memperhatikan aspek pendidikan dan daya jangkau ke kawasan TNGHS. Masyarakat yang tinggal di dekat kawasan TNGHS harus diberikan penyuluhan tentang pentingnya perbaikan kelembagaan dengan memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (hanya SD dan SLTP).
2. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di daerah TNGHS dapat dilakukan melalui perbaikan sistem sumberdaya dan kelembagaan yang tumbuh dalam masyarakat dengan dukungan teknologi dan regulasi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuni S. 2003. Inovasi Institusi untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Penyangga Kawasan Konservasi [Disertasi Program Pascasarjana] Bogor: IPB
- Black J.A, & D.J. Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Chusak W. 1996. Local institutions in common property resources: case study community based management watershed management in Northern Thailand [Phd Thesis] Cambridge. UMI Dissertation.
- Gunawan W. 2003. Persepsi dan Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Simasari terhadap Pelestarian Sumberdaya Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun [Skripsi

- Fakultas Kehutanan IPB]. Bogor: IPB.
- Amir H H. 2003. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Dearah Tropika [Terjemahan]. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Menteri Negara Kependidikan dan Lingkungan Hidup. 1986. Penelitian Pengembangan Wilayah Penyangga Kawasan Hutan Konservasi. Kerjasama Fakultas Kehutanan IPB dengan Proyek Pengembangan Efisiensi Penggunaan Sumber-Sumber Kehutanan.